

**MITIGASI BENCANA ABRASI DI KECAMATAN TUGU OLEH PEMERINTAH
KOTA SEMARANG**



Muhamad Dwi Septiawan¹, Ida Hayu Dwimawanti², Tri Yuniningsih³

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Email : dwiseptiawan1999@gmail.com

ABSTRACT

Coastal areas in Indonesia are very vulnerable to a disaster. One of the threats to coastal areas is abrasion. Problems regarding abrasion in recent years tend to increase in various coastal areas, especially those that occur in coastal areas in the Tugu sub-district. However, the implementation of abrasion disaster mitigation that has been carried out has not been able to run optimally. This study aims to analyze the abrasion disaster mitigation in the Tugu sub-district and the supporting and inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative research method. Data were collected through interview techniques for primary data, with 4 informants who were determined using snowball sampling techniques and accidental sampling techniques. Then documentation techniques for secondary data. The results of the study show that the implementation of abrasion disaster mitigation in the Tugu sub-district is carried out by structural and non-structural mitigation through environmental conservation, regulation of building layouts and infrastructure development, and outreach and education. In addition, the implementation of abrasion disaster mitigation is still not optimal, this is because the coordination between actors has not gone smoothly, the mindset of the people who still do not care, and the limited available budget. The researcher recommends increasing coordination between actors regarding the implementation of regional spatial planning so that an integrated implementation of abrasion disaster mitigation is created.

Keywords: *Mitigation, Disaster, Abrasion*

¹ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

² Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

³ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

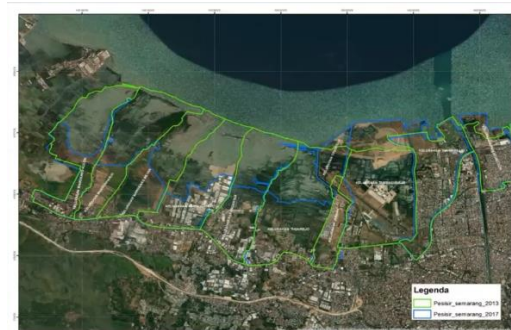
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang dibandingkan dengan negara kepulauan lainnya. Sebagai negara kepulauan, wilayah pesisir di Indonesia sangat rentan terhadap suatu bencana. Berbagai macam bencana dapat terjadi di daerah pesisir di Indonesia seperti bencana tsunami, banjir, abrasi, kenaikan permukaan air laut (*sea level rise*), dan bencana alam laut lainnya.

Salah satu ancaman bagi wilayah atau daerah pesisir di Indonesia yaitu terjadinya perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai merupakan suatu bentuk dari dinamisasi wilayah pantai, perubahan garis pantai yang terjadi yaitu berupa sedimentasi atau akresi dan abrasi. Proses terjadinya abrasi pada daerah pesisir pantai diakibatkan oleh 2 faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor Alam biasanya diakibat karena adanya arus gelombang, peningkatan suhu di bumi sehingga mengakibatkan pemanasan global dan, bentuk topografi daerah. Faktor Manusia biasanya diakibatkan karena adanya perusakan dan penebangan mangrove di daerah pesisir pantai dan, kegiatan penambangan pasir di daerah pesisir.

Pengaruh yang ditimbulkan dari bencana abrasi di wilayah pesisir sangat besar, yaitu garis pantai atau luas area pantai akan berkurang atau menyempit dan apabila tidak segera diatasi, maka daerah yang berada di permukaan rendah akan tenggelam dan pantai yang menjadi tempat wisata akan rusak atau hilang karena abrasi. Selain itu, kawasan tempat tinggal masyarakat serta tambak juga akan tergerus ke laut. Tidak sedikit warga yang berada di daerah pesisir yang direlokasi karena dampak abrasi pantai ini.

Gambar 1.1 Peta Perubahan Pesisir di Kota Semarang



Sumber: Yayasan Konservasi Alam Nusantara dalam Diskusi Pojok Iklim KLHK 2020

Berdasarkan dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perubahan garis pantai yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2013-2017 begitu sangat cepat mengalami pengurangan garis pantai akibat tergerus oleh bencana abrasi yang terjadi. Selain itu, menurut Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jateng, perubahan garis pantai di kota Semarang sepanjang tahun 2013-2017 mengalami

kemunduran garis pantai sepanjang 2,7 kilometer. Selain itu, akibat dari terjadinya abrasi juga menenggelamkan lahan seluas 1.900 hektar.

**Luas Abrasi tahun 1989-2016 di
Kecamatan Tugu**

kelurahan	Abrasi (ha)		Total abrasi
	1989- 2009	2009- 2016	
Tugurejo	21,55	8,72	30,28
Karanganyar	56,10	93,02	149,12
Randugarut	59,49	95,42	154,91
Mangkang wetan	43,83	44,86	88,69
Mangunharjo	105,63	49,83	155,46
Mangkang kulon	52,93	44,16	97,09
Jumlah	340,14	336,01	675,55

Sumber: Prabowo H, I. Buchori. 2018. Mitigasi yang Diinisiasi Masyarakat Akibat Abrasi di Kawasan Pesisir Kota Semarang

Berdasarkan data dari tabel luasan abrasi tersebut dapat dilihat bahwa bencana abrasi yang terjadi di kecamatan Tugu semua kelurahan yang ada sudah terdampak dari terjadinya abrasi tersebut. Selama bencana abrasi yang terjadi di sepanjang pesisir kecamatan Tugu total luasan abrasi yang terjadi yaitu sebesar 675,55 ha. Selain itu, pada Tahun 2020 dari luas wilayah Kecamatan Tugu, yakni 2.923,34 hektar, 1.211,20 hektare di antaranya terkena abrasi. Abrasi yang terjadi di Kecamatan Tugu terjadi berada didekat kawasan

industri wijayakusuma. Hal tersebut menjadi ancaman bagi perindustrian yang ada di Kota Semarang.

Diketahui pada tahun 2011-2019 daerah pesisir di kecamatan Tugu yang awalnya mundur sepanjang 2,0 km hingga menjadi 6.5 km yang diakibatkan terjadinya abrasi. Akibatnya banyak rumah warga yang mengalami kerusakan, infrastruktur rusak parah bahkan ada yang sampai tenggelam, sementara itu masyarakat terpaksa beralih profesi akibat mata pencaharian awal mereka rusak bahkan hilang akibat dari terjadinya abrasi pantai. Kondisi tersebut tentunya membuat kesulitan dan dapat mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat setempat.

Permasalahan daerah pesisir di Kota Semarang akibat dari abrasi yang hampir terjadi setiap tahun merupakan sebuah ancaman bagi daerah pesisir. Salah satu daerah pesisir yang terdampak paling besar atau luas wilayahnya akibat dari bencana abrasi ini adalah Kecamatan Tugu. Sementara itu dengan mitigasi atau pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini belum bisa mengurangi atau bahkan menghentikan dampak yang diakibatkan dari terjadinya abrasi tersebut. Hal tersebut maka, peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian mengenai penanggulangan yaitu mitigasi bencana abrasi di Kecamatan Tugu oleh pemerintah Kota Semarang yang tujuan

untuk meminimalisir serta mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar akibat dari dampak terjadinya bencana abrasi pantai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mitigasi bencana abrasi di kecamatan Tugu yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mitigasi abrasi di kecamatan Tugu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mitigasi abrasi di kecamatan Tugu yang telah dilakukan oleh pemerintah kota semarang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat mitigasi abrasi di kecamatan Tugu yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) yaitu mendefinisikan serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci

hubunganhubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset. Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Menurut Keban menyatakan bahwa Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4).

2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Robert Friederichs paradigma ialah seperangkat nilai yang membentuk cara berpikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektifnya terhadap realita sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut.

Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:31-34) menjelaskan terdapat enam paradigma pada ilmu administrasi publik, yaitu:

1. Dikotomi Politik/Administrasi
2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara
3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi
5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik
6. *Governance*

3. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan evaluasi program dan audit (Ott. Hyde & Shafritz, 1990, h.ix). Sedangkan Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing* dan *controlling*.

4. Manajemen Bencana

Menurut National Fire Protection Association (NFPA) 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs (dalam Tiyas Trirahayu 2015) mendefinisikan manajemen bencana adalah upaya sistematis komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkannya.

menurut Arie Priambodo (2009: 17-18) dalam Tiyas Trirahayu 2015 mengungkapkan secara sederhana sistem tanggap bencana (*disaster management*) meliputi empat tahapan yaitu :

1. *Mitigation*: Pengurangan – Pencegahan
2. *Preparedness*: Perencanaan- Persiapan
3. *Response*: Penyelamatan – Pertolongan
4. *Recovery*: Pemulihan- Pengawasan

5. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana menurut *Federal Emergency Management Agency (FEMA)* yaitu mitigasi didefinisikan sebagai aksi yang mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang bahaya bencana alam dan

akibatnya terhadap manusia dan harta benda.

Beberapa langkah yang dilakukan sebagai bentuk pengurangan risiko terhadap abrasi adalah melakukan mitigasi bencana. Menurut Sanjoto (2010, dalam Chalissa Faiz N) mitigasi bencana dapat dibagi menjadi dua macam bentuk mitigasi, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi-non struktural. Mitigasi *struktural* (fisik) artinya upaya mitigasi bencana dilakukan dengan membuat perlindungan tertentu baik secara alami maupun buatan. Secara alami misalnya dengan penanaman kembali mangrove, pembuatan terumbu karang, dan pembuatan bukit pasir pantai (*sand dune*). Sedangkan secara buatan misalnya dengan membuat *breack water*, tembok laut, tanggul, maupun kontruksi pelindung lainnya. Mitigasi bencana secara *non-struktural* artinya dilakukan dalam bentuk bukan pembangunan fisik, namun dalam bentuk tindakan non fisik, misalnya pembuatan peta rawan bencana abrasi, pemberian sistem peringatan dini, informasi publik dan penyuluhan, serta penyusunan tata ruang.

6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Mitigasi Bencana

Menurut Syamsuardi Syam (2014) dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan mitigasi bencana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung mitigasi bencana yaitu adanya kebijakan dari pemerintah yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007, adalah undang-undang tentang penanggulangan bencana sebagai dasar aturan dalam menangani bencana. Selanjutnya untuk faktor penghambat mitigasi yaitu pola pikir (*mindset*) masyarakat dan juga pemangku kepentingan yang masih belum satu pikiran yaitu masih rendahnya kesadaran tentang pentingnya mitigasi bencana abrasi, kurangnya koordinasi antar aktor atau pihak yang dimaksudkan adalah belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, LSM dan masyarakat dalam mitigasi bencana abrasi, keterbatasan anggaran dalam membiayai pelaksanaan mitigasi baik secara *structural* maupun *non-structural* yang tidak mencukupi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif rangkaian kegiatan untuk mendapatkan suatu data yang bersifat

apa adanya dan yang hasilnya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif menggambarkan dan melukiskan dan keadaan subjek atau objek penelitian (Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat) pada saat sekarang yang mendasarkan faktor-faktor yang nampak atau sebagaimana adanya, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Mitigasi Bencana Abrasi Di Kecamatan Tugu Oleh Pemerintah Kota Semarang.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber-sumber utama penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti melalui literatur seperti jurnal; artikel; berita dalam situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dokumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek tersebut, yaitu Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, Staff Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, Staff Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Konservasi Lingkungan DLH Kota Semarang, dan Ketua Kelompok Tani Mangrove.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mitigasi Bencana Abrasi Di Kecamatan Tugu Oleh Pemerintah Kota Semarang

Mitigasi bencana juga merupakan upaya yang harus disiapkan untuk menghadapi suatu bencana guna untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Mitigasi bencana yang dilakukan dalam mencegah dan meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana abrasi yaitu dengan melakukan mitigasi secara *struktural* dan *non-struktural*.

A. Mitigasi Struktural

Menurut Sanjoto (2010, dalam Chalissa Faiz N) mitigasi *struktural* (fisik) artinya upaya mitigasi bencana dilakukan dengan membuat perlindungan tertentu baik secara alami maupun buatan. Secara alami misalnya dengan penanaman kembali mangrove, pembuatan terumbu karang, dan pembuatan bukit pasir pantai (*sand dune*). Sedangkan secara buatan misalnya dengan membuat *breack water*, tembok laut, tanggul, maupun kontruksi pelindung lainnya.

a) Konservasi Lingkungan

Pelaksanaan konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman serta konservasi mangrove merupakan salah bentuk mitigasi bencana abrasi yang dapat

dilakukan. Pelaksanaan konservasi mangrove ini juga tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat saja, namun juga harus dilakukan secara bersama-sama dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses mitigasi bencana abrasi tersebut. Konservasi mangrove yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang yaitu dibantu oleh beberapa aktor atau pihak seperti beberapa dinas yang ada di kota Semarang, masyarakat, pihak swasta seperti perusahaan BUMN atau swasta, dan beberapa kelompok relawan serta beberapa dari pihak akademisi. Pelaksanaan konservasi mangrove yang sudah dilakukan tersebut sudah bisa untuk mengurangi laju abrasi yang terjadi. Hal tersebut merupakan sebagian dari berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan konservasi mangrove dalam usaha mencegah atau mengatasi bencana abrasi. Namun pelaksanaan konservasi mangrove tersebut masih belum sepenuhnya menghentikan laju abrasi yang terjadi di sepanjang wilayah pesisir yang ada di kecamatan Tugu. Hal tersebut dikarekan masih belum meratanya luasan

konservasi mangrove yang ada di beberapa wilayah pesisir. Selain itu juga luasan konservasi mangrove tersebut juga mengalami penurunan di beberapa wilayah pesisir yang ada dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya pelaksanaan konservasi mangrove yang sudah dilakukan masih belum dapat menghentikan laju abrasi yang terjadi.

b) Pengaturan Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur, Tata Bangunan

Mitigasi struktural lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam mitigasi bencana abrasi tersebut yaitu dengan melakukan pembangunan sabuk pantai, pemasangan alat pemantau jarak jauh, dan juga tata bangunan. Mitigasi bencana struktural dilakukan dengan vegetasi buatan yaitu dengan pembangunan fisik yang sudah dilakukan tersebut dapat menjadi penyeimbang bagi mitigasi bencana abrasi dengan vegetasi alami yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu dengan melakukan konservasi mangrove. Sehingga dalam beberapa tahun setelah dilakukan pembangunan tersebut bisa untuk melindungi daerah pesisir dan

manjaga konservasi mangrove tetap terjaga dari terjangan ombak, hal tersebut dapat mengurangi dan mencegah dampak serta dapat meredam laju abrasi yang terjadi di kecamatan Tugu setiap tahunnya. Namun pelaksanaan pembangunan tersebut hanya dilakukan beberapa kali dan masih belum merata atau menyeluruh dilakukan di sepanjang daerah yang ada di sepanjang wilayah pesisir yang ada di kecamatan Tugu. Akibatnya pelaksanaan mitigasi bencana abrasi dengan vegetasi buatan tersebut masih belum sepenuhnya atau belum maksimal sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan mitigasi bencana abrasi dengan vegetasi alami, hal tersebut membuat laju bencana abrasi yang terjadi masih belum sepenuhnya bisa dihentikan.

B. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi bencana secara *non-struktural* merupakan mitigasi bencana yang dilakukan dalam bentuk bukan pembangunan fisik, namun dalam bentuk tindakan non fisik, misalnya pembuatan peta rawan bencana abrasi, pemberian sistem peringatan dini, informasi publik dan penyuluhan, serta penyusunan tata ruang (Sanjoto

2010, dalam Chalissa Faiz N). Tindakan mitigasi bencana akan lebih efektif ketika tindakan mitigasi *struktural* disertai juga dengan tindakan mitigasi *non-struktural*. Mitigasi non-struktural yang dilakukan di Kecamatan Tugu adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan ancaman dari bencana yang terjadi yaitu bencana abrasi.

a) Pendidikan dan Sosialisasi Mitigasi Bencana

Pendidikan dan sosialisasi dalam mitigasi bencana abrasi merupakan salah satu mitigasi bencana yang lebih sering dilakukan oleh pemerintah kota Semarang. Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi yang sudah dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dari masyarakat serta dapat membuat masyarakat menjadi lebih memahami tentang ancaman serta dampak dan pencegahan dari bencana abrasi dan juga tentang pentingnya peranan konservasi mangrove bagi wilayah pesisir. Setelah dilakukannya pendidikan dan sosialisasi tersebut, sekarang masyarakat sudah mulai

menyadari tentang ancaman serta dampak dari bencana abrasi, serta bagaimana peranan penting dari konservasi mangrove dan juga tentang bagaimana pencegahan dari bencana abrasi. Namun masih belum meratanya masyarakat yang mulai aktif untuk menerapkan apa yang sudah mereka peroleh setelah dilakukannya pendidikan dan sosialisasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat bahwa hanya beberapa dari masyarakat yang sudah melakukan pembibitan sampai dengan penanaman mangrove. Akibatnya hanya beberapa dari masyarakat saja yang aktif dalam melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap bencana abrasi yang terjadi di sepanjang wilayah pesisir yang ada di kecamatan Tugu.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Mitigasi Bencana Abrasi Di Kecamatan Tugu

Peran pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana abrasi harus memberikan jaminan supaya serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu,

daya dukung lingkungan yang ada di wilayah pesisir seharusnya bisa tetap terpelihara dan terjaga baik sehingga dapat dimanfaatkan secara terprogram yang secara lestari bagi kesejahteraan generasi mendatang.

Pelaksanaan mitigasi bencana abrasi pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari *internal* ataupun *eksternal*. Faktor yang berasal dari *internal* ataupun *eksternal* ini dapat menjadi dorongan ataupun hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Berikut ini merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat didalam mitigasi bencana abrasi di Kecamatan Tugu oleh Pemerintah Kota Semarang.

A. Kebijakan

Kebijakan menjadi salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan mitigasi bencana abrasi di Kecamatan Tugu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan

yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pembuat kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Miriam Budiarjo dalam rahmat hidayat 2014).

Pelaksanaan mitigasi bencana abrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dengan kebijakan yang ada untuk saat ini membuat pelaksanaan mitigasi bencana abrasi yang dilakukan menjadi lebih ringan karena dengan adanya peranan yang ada dari pemerintah pusat dalam proses pelaksanaan mitigasi yang berlangsung. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kota semarang hanya melakukan pembangunan dengan skala kecil di wilayah pesisir yang ada di kecamatan Tugu Selain itu, dengan menjadi lebih

ringannya pelaksanaan mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang membuat lebih focus pada pelaksanaan mitigasi bencana abrasi bisa dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang ada. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana abrasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang juga bisa menjadi lebih matang dan maksimal pelaksanaan mitigasinya.

B. Pola Pikir (*Mindset*)

Pola pikir (*mindset*) merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana abrasi di kecamatan Tugu oleh pemerintah Kota Semarang. Selama ini pemahaman atau pola pikir dari masyarakat tentang potensi ancaman dan pencegahan dari bencana abrasi masih sangat kurang. Karena dari masyarakat

masih beranggapan bahwa bencana abrasi terjadi tidak menimbulkan kerugian yang besar. Hal tersebut membuat peran dari masyarakat dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana abrasi tidak begitu besar. Karena hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan mitigasi bencana abrasi tersebut, baik secara mandiri atau bergabung dengan kelompok relawan yang sudah dibentuk sebelumnya. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi abrasi data dilakukan dengan menjaga kelesatrian laut. Seperti tetap menjaga lingkungan diwilayah pesisir serta tidak menggali dan mengambil pasir didasar. Selain itu, dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat akan tumbuh rasa memiliki sehingga mau menjaga dan merawat konstruksi *hybrid engineering* yang berada di

wilayahnya. Selain itu, dengan melibatkan langsung masyarakat di daerah pesisir dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan *hybrid engineering*, seperti kegiatan pembangunan konstruksi, pendidikan dan sosialisasi, akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesadaran masyarakat akan nilai penting dari fungsi perlindungan pesisir berbasis vegetasi alami ataupun buatan.

C. Koordinasi Antar Aktor

Koordinasi antar aktor merupakan salah satu hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana abrasi di Kecamatan Tugu oleh pemerintah Kota Semarang. Permasalahan dalam mencegah dan menanggulangi abrasi pantai bukan hanya terletak pada pelaksanaa program pada masing-masing instansi yang terkait. Namun juga terletak pada jaringan koordinasi antar sesama pelaksana program

yang memiliki misi yang sama, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar lembaga pemerintah. Melihat kondisi bencana abrasi yang terjadi di kecamatan Tugu, maka perlu adanya kerjasama antar elemen baik dari pemerintah, swasta ataupun masyarakat yang saling berkoordinasi dengan baik dan serasi. Selama ini koordinasi yang terjadi antara elemen atau aktor dalam pelaksanaan mitigasi bencana abrasi masih belum berjalan dengan baik. Karena dari beberapa aktor yang terlibat dalam pelaksanaan mitigasi bencana abrasi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum berdampingan untuk melakukan mitigasi secara bersama. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan mitigasi bencana abrasi yang dilakukan kedepannya.

D. Anggaran

Anggaran merupakan salah aspek yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mitigasi bencana abrasi di kecamatan Tugu oleh pemerintah Kota Semarang. Anggaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana abrasi. Tanpa adanya anggaran sebuah kegiatan mitigasi bencana tidak dapat terlaksana. . Karena anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kota Semarang tidak memadai atau masih belum mencukupi karena harus dibagi dengan anggaran untuk melakukan mitigasi bencana lainnya selain bencana abrasi. Selain itu, dengan masih belum adanya anggaran khusus yang diperuntukan dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana abrasi tersebut membuat pelaksanaan mitigasi bencana abrasi yang dilakukan hanya beberapa kali saja

setiap tahunnya. Anggaran yang masih belum mencukupi atau tidak memadai ini menyebabkan proses pelaksanaan mitigasi bencana abrasi tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan mitigasi bencana abrasi di kecamatan tugu yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang jika dilihat dari pelaksanaan mitigasi baik secara struktural dan non-struktural yang dilakukan selama dinilai belum efektif. Hal ini dikarenakan BLU UPTD Trans Semarang dalam mencapai tujuannya, pengadaan sosialisasi dan upaya strategi belum dilakukan secara maksimal.

Faktor yang mendukung proses pelaksanaan mitigasi bencana abrasi di kecamatan Tugu oleh pemerintah kota Semarang adalah kebijakan. Sedangkan untuk faktor yang menghambat proses pelaksanaan mitigasi bencana abrasi di kecamatan Tugu oleh pemerintah kota Semarang adalah pola pikir (*mindset*), koordinasi antar aktor, dan anggaran.

SARAN

1. Pemerintah kota Semarang harus bisa merubah *mindset* atau pola pikir dari

masyarakat ataupun dari internal dalam pemerintahan yaitu dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya baik itu secara langsung maupun secara media digital tentang potensi ancaman dampak dan pencegahan dari bencana abrasi. Karena hal tersebut bertujuan agar masyarakat ataupun instansi pemerintah lainnya dapat lebih mengetahui dan memahami dari pontensi ancaman dampak serta proses dari pelaksanaan mitigasi bencana abrasi.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota Semarang lebih menguatkan koordinasi antar aktor yaitu lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran yang sama yaitu dengan melakukan rencana tata ruang wilayah dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana abrasi. Karena hal ini bertujuan agar terciptanya pelaksanaan mitigasi bencana yang terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana abrasi.
3. Pemerintah Kota Semarang harus memiliki ketersediaan anggaran yang mencukupi serta pembagian anggaran yang sesuai dengan pelaksanaan mitigasi bencana yang dilakukan seperti halnya anggaran khusus untuk mitigasi bencana abrasi yang masih belum memiliki anggaran khusus dalam pelaksanaan mitigasi bencana abrasi. Karena hal ini bertujuan agar proses

pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan dengan maksimal karena adanya pembagian anggaran yang dapat difokuskan untuk melakukan mitigasi bencana abrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Indonesia, R. (2019). *Rencana nasional penanggulangan bencana 2015-2019*.

Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gava Media.

Nasional, B., & Bencana, P. (2008). *Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana*.

Jurnal:

Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, (4), 21–40. Retrieved from www.juliwi.com.

Hartati, R., Pribadi, R., Astuti, R. W., Yesiana, R., & H, I. Y. (2016). Kajian Pengamanan Dan Perlindungan Pantai Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu Dan Genuk, Kota Semarang. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(2), 95. <https://doi.org/10.14710/jkt.v19i2.823>

Fajrin, F. M., & Muskananfolo, M. R. (2016). Karakteristik Abrasi Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Pesisir Semarang Barat. *Management of Aquatic Resources*, 5(2), 43–50.

Safitri, F., Suryanti, S., & Febrianto, S. (2019). Analisis Perubahan Garis

Pantai

Akibat Erosi Di Pesisir Kota Semarang. *Geomatika*, 25(1), 37. <https://doi.org/10.24895/jig.2019.25-1.958>

Hidayat, Rahmad. (2014). Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012). 1–16

Prabowo, H., & Buchori, I. (2018). Mitigasi yang Diinisiasi Masyarakat Akibat Abrasi di Kawasan Pesisir Kota Semarang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 7(1), 44–55. Universitas Diponegoro